

Judul : Atasi bencana alam, BNPB kudu lebih gesit
Tanggal : Minggu, 17 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Atasi Bencana Alam **BNPB Kudu Lebih Gesit**

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta lebih sigap merespons berbagai peristiwa bencana alam akibat cuaca ekstrem. Ini penting untuk memastikan masyarakat korban bencana dapat mengakses bantuan dan meminimalisir dampak dari bencana alam.

Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya menyalahkan BNPB masih kurang gesit merespons bencana akibat cuaca ekstrem di berbagai daerah.

Dia lalu menyoroti kinerja BNPB dalam penanggulangan banjir yang melanda Kota Semarang.

"Ini yang kami sayangkan terkait respons masalah banjir di Kota Semarang, yang menurut kami kurang fleksibel dalam situasi *extraordinary* di lapangan," terang Wisnu.

Wisnu mengaku telah meninjau langsung situasi banjir yang terjadi di Semarang. Bahkan, pihaknya melalui Komisi VIII DPR, telah mengajukan permohonan advokasi terkait bantuan pangan dan dapur umum untuk korban di pengungsian kepada BNPB. Namun respons yang diperolehnya kurang memuaskan.

"Kami justru dilempar ke BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, red) dengan alasan terburuk kewenangan hingga belum adanya penetapan status darurat dari Pemerintah Daerah setempat," sesalnya.

Padahal akibat bencana alam banjir ini, sambungnya, warga sangat membutuhkan langkah yang cepat dan konkret dari Pemerintah untuk meminimalisir dampak banjir ini.

"BNPB harusnya bisa melakukan assesment secara mandiri dan mengambil keputusan cepat, sehingga bantuan bisa segera diakses oleh masyarakat," harapnya.

Karena itu, dia meminta persoalan hambatan-hambatan birokratis yang terjadi ini harus bisa dihilangkan. Apalagi taruhannya adalah kelangsungan hidup dari para korban bencana.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga sesalkan hambatan birokratis di BNPB akibat kurang sosialisasinya program kebencanaan oleh BNPB terhadap masyarakat. Padahal, BNPB merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab memitigasi risiko bencana dan memiliki peta potensi bencana di setiap wilayah di Indonesia.

Anggota Fraksi PKS ini menegaskan, upaya sosialisasi kebencanaan yang menyasar langsung ke masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah rawan bencana, harus semaksimal mungkin dilakukan. BNPB mesti meningkatkan frekuensi kegiatan sosialisasi kebencanaan dengan memanfaatkan berbagai medium yang efektif.

"BNPB juga perlu membekali masyarakat dengan pengetahuan teknis yang memadai seputar simulasi tanggap darurat apabila terjadi bencana secara tiba-tiba," jelas anggota DPR dapil Jateng I ini.

Dia menambahkan, Komisi VIII DPR siap bekerja sama dengan BNPB dalam menyelesaikan program sosialisasi kebencanaan dengan menyasar masyarakat di dapil. Terlebih, setiap wilayah di dapil juga menyimpan karakteristik risiko bencananya tersendiri.

"Komisi VIII DPR sangat terbuka untuk dilibatkan dalam membantu BNPB memenuhi tanggung jawab itu. Ke depan, masyarakat semakin sadar terhadap risiko bencana yang berpotensi timbul di daerahnya maupun sekitarnya," harapnya. ■ KAL